

Pengaruh *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Zaitun Rauzah¹

M. Haykal², Naz'aina³, Ikhyanuddin⁴

zaitun.160420080@mhs.unimal.ac.id¹, haykal@unimal.ac.id², Nazaina@unimal.ac.id³,
ikhyanuddin@unimal.ac.id⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

**Corresponding Author*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dalam mengetahui *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama 2013-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data panel. Data diperoleh melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang diakses di www.djpk.kemenkeu.go.id. Metode analisis data dalam penelitian ini metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih tergolong belum memiliki kemandirian daerah yang baik

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah*

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of Own Source Revenues, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Regional Expenditures to know flypaper effect in Regencies/Cities in Aceh Province during 2013-2020. The data used in this research is secondary data in the form of panel data. Data is obtained through the website of the Directorate General of Fiscal Finance (DJPK) which is accessed at www.djpk.kemenkeu.go.id. The method of data analysis in this study is the panel data regression analysis method. The results of the study find that Own Source Revenues, General Allocation Funds and Special Allocation Funds have a positive and significant effect on regional expenditures. Beside that, this study also proves that there is a flypaper effect in Regencies/Cities in Aceh Province which shows that Regencies/Cities in Aceh Province are still classified as not having good regional independence.

Key Words : *Own Source Revenues, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Regional Expenditures*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah membawa respon dilakukannya otonomi daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah agar dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Hal ini tentu saja mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan dalam mengemban urusan tersebut lebih banyak dibanding sebelum otonomi. Namun pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan dana utama. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Suatu perimbangan dikatakan ideal jika pemerintah daerah dapat membiayai tugas-tugas dan kegiatannya secara mandiri. Transfer pusat memanglah diusahakan demi meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar daerah tersebut dapat menggali potensi-potensinya. Akan tetapi, banyaknya belanja daerah akan membuat daerah tersebut nyaman dengan kondisi tersebut, ketergantungan dengan dana pusat pun terjadi (Naganathan & Sivagnanam, 2013). Akibatnya, daerah malah jadi tidak malas dalam menggali potensi dan tidak mandiri (Shah, 2014). Oleh sebab itu, potensi daerah dapat ditingkatkan melalui peningkatan anggaran belanja daerah.

Belanja daerah merupakan komponen penting yang selalu mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Hal ini berbanding lurus dengan yang diungkapkan oleh Simanjuntak *et al* (2013), dimana belanja daerah adalah pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat melalui UU No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pemberian otonomi khusus ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, dimana Provinsi Aceh masih tergolong tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan 3 tahun 2019 hanya sebesar 3,76%, berada di bawah perekonomian nasional yang telah berhasil mencapai 5,02%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan tingkat kemiskinan di Aceh, dimana BPS juga merilis bahwa Aceh menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera (urutan ke 6 Nasional) di tahun 2019, dan hal tersebut terjadi 3 kali berturut-turut. Hal tersebut terjadi dikarenakan Aceh belum begitu berkembang dan masih sangat bergantung pada realisasi APBA maupun APBK (BPS, 2019). Selain itu, Aceh juga tergolong daerah yang masih belum mandiri dan tergantung pada pemerintah pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kemandirian Aceh pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Tingkat Kemandirian Provinsi Aceh periode 2013-2019

Tahun	Tingkat Kemandirian
2013	11.32%
2014	8.64%
2015	8.31%
2016	8.46%
2017	7.99%
2018	6.38%
2019	7.13%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa kemandirian daerah di Aceh cenderung menurun, dimana kenaikan hanya terjadi di tahun 2016 dan 2019 saja. Selain itu, seluruh angka rasio kemandirian di atas berada di bawah 25%, dimana menurut Halim (2008), nilai tersebut tergolong dalam kriteria rendah sekali. Ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD yang begitu rendah di Aceh dan membuktikan bahwa belanja daerah cenderung didukung oleh dana transfer pusat. Ketidakmandirian tersebut terjadi karena Aceh selama ini terlalu bergantung dengan dana transfer pusat dalam mendanai belanja daerahnya. Terlebih lagi Aceh memiliki Dana Otonomi Khusus yang jumlahnya begitu besar, sehingga Pemerintah Daerah terlalu nyaman dan bergantung dengan OTSUS, sehingga tidak mencoba menggali sumber PAD lainnya. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Haryani (2017) dan Zulfan & Mustika (2018) yang mendokumentasikan bahwa Aceh sangat bergantung pada dana transfer pusat seperti DAU, DAK dan OTSUS, sehingga terjadi fenomena *flypaper effect* di Provinsi Aceh.

Selanjutnya, beberapa riset sebelumnya menemukan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Mulyati & Yusriadi, 2017; Syamni & Ichsan, 2018; Ferdiansyah *et al.*, 2018; Anwar *et al.*, 2018). Akan tetapi, beberapa studi lainnya mendokumentasikan hasil yang kontradiktif, dimana faktor-faktor tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Putra & Dwirandra, 2015; Ernayani, 2017; Rasyid, 2018; Indriansyah, 2017). Ini menunjukkan bahwa pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja daerah masih menjadi perdebatan di kalangan para peneliti, sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya kembali.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Flypaper Effect*

Flypaper Effect dicetuskan untuk memprediksikan bahwa dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membuat daerah sangat tergantung pada dana tersebut (Roy *et al.*, 2015). *Flypaper effect* merupakan suatu fenomena mengenai ketergantungan daerah otonom pada transfer pusat, sehingga melupakan tugas untuk menggali pendapatan asli daerah dan potensi daerah (Inayanti & Setiawan, 2012).

Selanjutnya, *flypaper effect* merupakan suatu fenomena di saat Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana transfer pusat dalam merealisasikan belanja daerahnya dibandingkan dengan PAD (Zulfan & Mustika, 2018). Transfer pusat yang tidak bersyarat tersebut dapat diprosikan dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi dengan kemampuan keuangan daerah (Oktavia, 2014).

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan sejumlah anggaran pengeluaran baik yang langsung maupun yang tidak langsung terkait dan berhubungan dengan suatu program atau kegiatan. Menurut Kusumadewi (2007), Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran. Namun menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa belanja daerah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pengertian belanja daerah menurut Halim (2016) adalah penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi. Menurut Abdullah dan Riani (2020), belanja daerah dapat didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran kas daerah dalam satu periode yang digunakan untuk kegiatan daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh Pemda dalam rangka melaksanakan wewenang

dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintahan di atasnya (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

3. Pendapatan Asli Daerah

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan pendapatan pemerintah daerah adalah semua aliran sumber dana keuangan yang masuk ke kas daerah. Sumber utama pendapatan daerah adalah pajak daerah, lisensi dan denda, penilaian khusus, dana transfer antar pemerintah, dan lain-lain pendapatan. Menurut pasal 6 UU No. 32 tahun 2004, PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah. Halim (2016) menyatakan bahwa PAD didefinisikan sebagai seluruh pendapatan yang diperoleh daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi asli daerah tersebut. Tahar dan Zhakiya (2011) mengatakan bahwa tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

4. Dana Alokasi Umum

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diperhitungkan dari pendapatan dalam negeri neto (UU RI No 22 Tahun 2011 Tentang APBN Tahun Anggaran 2012). Dalam perhitungan DAU, kebutuhan daerah tersebut dicerminkan dari variabel-variabel kebutuhan fiskal yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) serta Indeks Kemiskinan Relatif (IKR) (Halim, 2016). Tujuan dari diberikannya DAU adalah untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD (Ferdiansyah *et al.*, 2014).

Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat ini sesungguhnya berasal dari danayang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan (Mahsun *et al.*, 2013). Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan pusat dan antar daerah, sehingga DAU tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akanmendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah (Halim, 2016).

5. Dana Alokasi Khusus

Pasal 1 UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Sugiyanta, 2016). Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Ferdiansyah *et al.*, 2018).

Pengembangan Penelitian

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Dalam menjalankan desentralisasi wilayah, pihak pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan PAD dengan cara memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah dengan tujuan dapat membiayai belanja daerah melalui pembangunan infrastruktur dan sarana-sarana yang ada di daerah tersebut (Wandira, 2013). Peningkatan PAD juga mendorong naiknya pengalokasian pada belanja daerah kabupaten/kota (Simanjuntak *et al.*, 2013).

Beberapa riset sebelumnya juga telah menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Mawarini & Abdullah (2013) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Aceh. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Syamni & Ichsan (2018) menemukan bahwa PAD dapat meningkatkan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Magowal (2013) juga mendokumentasikan hasil yang sama di Provinsi Sulawesi Utara. Ini menunjukkan bahwa PAD memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, yang artinya peningkatan PAD akan berdampak terhadap peningkatan belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten Kota di Provinsi Aceh

2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

DAU dapat diartikan sebagai dana transfer pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAU berfungsi dalam menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (Ferdiansyah *et al.*, 2018). Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut menjadi penyerahan kewenangan dari pihak pemerintah pusat kepada pihak pemerintah daerah (Hapid *et al.*, 2015). Pemerintah daerah dapat dengan leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang dapat diwujudkan dengan anggaran belanja daerah (Hairiyah *et al.*, 2017). Uraian tersebut menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sebagaimana telah dibuktikan oleh riset-riset sebelumnya (Rasyid, 2018; Ernaya, 2017; Putra & Dwirandra, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten Kota di Provinsi Aceh

3. Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diberikan oleh pemerintah pusat kepada pihak pemerintah daerah dengan tujuan mendanai kegiatan-kegiatan daerah yang memiliki sifat khusus, namun menjadi prioritas nasional (pusat). UU Nomor 33 Tahun 2004 mendokumentasikan bahwa kebutuhan khusus yang dimaksud ialah kebutuhan yang tidak dapat diprediksi dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam artian kebutuhan yang berbeda (tidak sama) dengan kebutuhan daerah lain. Di beberapa daerah, peran DAK sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh DAK dibandingkan dengan PAD (Nailufar & Safitrayati, 2019).

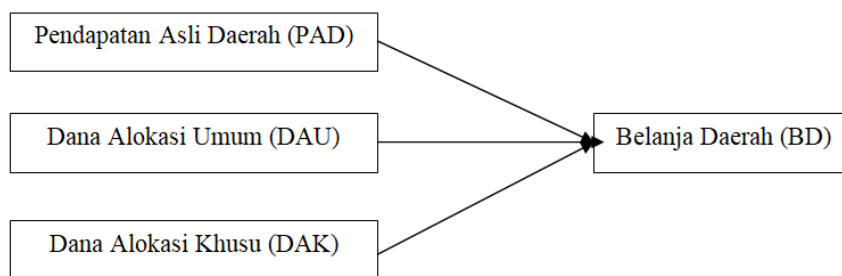
Beberapa studi sebelumnya telah membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Kajian yang dilakukan oleh Syamni & Ichsan (2018) di

Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Aceh mendokumentasikan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Ferdiansyah *et al.* (2018) menemukan bahwa peningkatan DAK mempengaruhi peningkatan belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten Kota di Provinsi Aceh

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor faktor penting yang telah diketahui dalam masalah tertentu. Berdasarkan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah Belanja Daerah, PAD, DAU dan DAK pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Lokasi penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang diakses melalui situs resmi yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh dengan periode waktu 2013 sampai dengan 2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus, dimana teknik tersebut menjadi seluruh populasi sebagai sampel. Dengan kata lain, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data historis yang diambil selama kurun waktu tahun 2013-2020 bersumber dari Laporan Realisasi APBD, yang diperoleh melalui dokumen publikasi laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang berupa realisasi belanja daerah, PAD, DAU dan DAK. Data tersebut di unduh melalui situs Departemen Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.go.id).

Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Uraian	Satuan Ukuran	Skala
Belanja Daerah (BD)	Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan	BD = belanja langsung + belanja tidak langsung	Rasio
Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota)	DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal	Rasio
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional	Realisasi DAK	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah	Rasio

Model Regresi Data Panel

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Persamaan statistik yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + e_{it}$$

Dimana :

- BD = Nilai Realisasi dari Belanja Daerah
 PAD = Nilai Realisasi dari Pendapatan Asli Daerah
 DAU = Nilai Realisasi dari Dana Alokasi Umum
 DAK = Nilai Realisasi dari Dana Alokasi Khusus
 e = *error term*

PEMBAHASAN

Deskriptif Statistik

Pada analisis statistik deskriptif, akan terlihat bagaimana rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi pada data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis deskriptif statistik dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Deskriptif Statistik

Variabel	Mean	Std Dev	Max	Min	Obs
BD	1,119.02	466.31	2,636.8	354.05	184
PAD	103.17	66.69	388.25	8.28	184
DAU	531.54	152.70	1,021.63	251.63	184
DAK	143.09	83.838	444.11	27.32	184

Sumber : Data Diolah, 2022

Keterangan : Dalam Milliar Rupiah

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa belanja daerah memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 1119.02 miliar dengan standar deviasinya sebesar Rp 466.31 miliar. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasinya menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki fluktuasi yang kecil. Nilai tertinggi belanja daerah sebesar Rp 2,636.8 miliar yaitu belanja daerah untuk Kabupaten Aceh Utara di tahun 2019. Hal ini dikarenakan luas wilayah, jumlah kecamatan, jumlah desa, jumlah SKPK, jumlah ASN dan jumlah penduduk yang paling besar menjadikan belanja daerah Aceh Utara sebagai yang tertinggi, dimana jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara di tahun 2019 sebesar 619,407 jiwa dan menjadi nilai yang tertinggi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (BPS, 2019). Selain itu, nilai terendah belanja daerah sebesar Rp 354.05 miliar yang ada pada Kota Subulussalam di tahun 2013. Hal ini dikarenakan masih banyaknya aspek-aspek yang belum dikembangkan di Kota Subulussalam, serta masih relatif barunya pemekaran daerah Kota Subulussalam. Sementara itu, jumlah pegawai yang tergolong kecil juga menjadi aspek yang membuat belanja daerahnya rendah.

Selanjutnya, PAD dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 103.17 miliar dengan standar deviasinya mencapai Rp 66.69 miliar. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasinya menunjukkan bahwa fluktuasi data PAD dalam penelitian ini tergolong kecil. Nilai tertinggi PAD sebesar Rp 388.25 miliar yang terdapat pada Kabupaten Aceh Utara di tahun 2016. Hal ini dikarenakan Aceh Utara mampu mengembangkan produksi pertanian, khususnya di komoditas padi di beberapa kecamatan, seperti Sawang, Tanah Luas, Meurah Mulia dan Langkahan. Selain itu, Aceh Utara yang tergolong memiliki luas daerah yang besar juga mendorong PAD-nya tinggi. Adapun nilai terendah PAD sebesar Rp 8.28 miliar yang terdapat pada Kota Subulussalam di tahun 2013. Hal ini dikarenakan Kota Sabulussalam merupakan daerah administratif baru yang belum begitu berkembang, dimana beberapa komoditas seperti karet, kopi dan coklat masih belum begitu berkembang, sehingga pendapatan asli daerahnya masih tergolong kecil.

Variabel DAU memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 531.54 miliar dengan nilai standar deviasinya sebesar Rp 152.70 miliar. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasinya menunjukkan bahwa fluktuasi daya DAU tergolong kecil. Nilai tertinggi DAU dalam penelitian ini sebesar Rp 1,021.63 miliar yang terdapat pada Kabupaten Aceh Utara di tahun 2016. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari atas celah fiskal dan alokasi dasar. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita dan indeks pembangunan manusia. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS di Kabupaten Aceh Utara. Selain itu, nilai terendah DAU dalam penelitian ini sebesar Rp 251.63 miliar yang terdapat pada Kota Subulussalam di tahun 2013. Hal ini dikarenakan Kota Subulussalam merupakan daerah yang baru pemekaran di tahun 2008, sehingga DAU pada daerah tersebut masih tergolong kecil.

Selanjutnya, nilai rata-rata variabel DAK sebesar Rp 143.09 miliar dengan nilai standar deviasinya sebesar Rp 83.838 miliar. Nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya menunjukkan bahwa data DAK dalam penelitian ini memiliki fluktuasi yang tergolong kecil. Nilai tertinggi DAK sebesar Rp 444.11 miliar yang terdapat pada Kabupaten Aceh Utara di tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan sektor pertanian dan perkebunan Aceh Utara di tahun 2019. Sektor pertanian dan perkebunan yang termaksud dalam 3 kriteria, yaitu umum, khusus dan teknis dalam memperoleh DAK. Kemudian, pemerintah Kabupaten Pidie juga melakukan pengusulan dan mem-*back up* kepada pemerintah pusat agar DAK yang diperoleh bisa tinggi untuk pembiayaan di sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, nilai terendah DAK dalam riset ini sebesar Rp 27.32 miliar untuk Kota Subulussalam di tahun 2014. Hal ini bisa terjadi dikarenakan belum optimalnya kinerja birokrasi dalam melihat peluang-peluang yang ada. Padahal jika birokrasi dapat kreatif untuk pengajuan atau penambahan DAK, maka itu bisa terjadi, melihat banyaknya

sektor yang potensial, seperti pariwisata, perikanan, pertanian, perkebunan yang tergolong masih belum optimal.

Analisis Korelasi

Analisis korelasi merupakan tahapan pengujian untuk melihat hubungan (korelasi) dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil analisis korelasi dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4 Analisis Korelasi

	BD	PAD	DAU	DAK
BD	1.0000			

PAD	0.8338	1.0000		
	(20.3787)***	-----		
DAU	0.9212	0.7173	1.0000	
	(31.9502)***	(15.1415)***	-----	
DAK	0.7611	0.5316	0.5779	1.0000
	(15.8341)***	(8.4672)***	(9.5538)***	-----

Sumber : Data Diolah, 2022

Keterangan : ***, **, * signifikan di level 1%, 5% dan 10%

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa PAD, DAU dan DAK memiliki hubungan positif dan signifikan dengan belanja daerah masing-masing sebesar 0.8338; 0.9212; 0.7611 dan ketiga nilai tersebut tergolong signifikan di level 1%. Selain itu, DAU dan DAK memiliki hubungan positif dan signifikan dengan PAD sebesar 0.7173; 0.5316 dan tergolong signifikan di level 1%, sedangkan DAK memiliki hubungan positif dan DAU sebesar 0.5779 dan tergolong signifikan di level 1%.

Teknik Pemilihan Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Jika nilai *probability chi square* berada di bawah nilai standar toleransi yaitu 0,05, maka model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dan jika nilai *probability* di atas 0,05, maka model yang terbaik adalah *Common Effect Model* (CEM). Adapun ditemukan hasil Uji Chow dalam penelitian ini nilai probabilitas pada Uji Chow sebesar 0,0000, dimana nilai tersebut dibawah nilai toleransi (0,05). Dengan kata lain, Uji Chow memilih *FEM* sebagai model yang tepat. Oleh karena itu dilanjutkan pada Uji Hausman untuk membandingkan antara *FEM* dan *REM*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk memilih model yang terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Apabila nilai probabilitas pada Uji Hausman berada di atas nilai standar toleransi yaitu 0,05, maka model yang terbaik adalah *Random Effect Model*, sedangkan jika nilai probabilitas berada di bawah nilai standar toleransi yaitu 0,05, maka model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Adapun hasil Uji Hausman di dalam penelitian ini bahwa nilai probabilitas pada pada Uji Hausman sebesar 0,0664, dimana nilai tersebut di atas nilai toleransi (0,05). Oleh karena itu, model yang terbaik di dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*, sehingga untuk Uji Asumsi Klasik dan estimasi regresi data panel akan menggunakan *Random Effect Model*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Adapun tahapan-tahapan hasil pengujian dalam uji asumsi klasik yaitu:

1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil penelitian ini nilai *Jarque-Bera* sebesar 4,6614 dengan tingkat probabilitas 0,0010, dimana nilai tersebut berada di bawah nilai toleransi kesalahan dalam penelitian ini (0.05). Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tergolong tidak normal. Akan tetapi, dikarenakan data dalam penelitian ini tergolong dalam data panel, dimana setiap objek memiliki tren data yang berbeda-beda, sehingga asumsi normalitas dapat diabaikan (Gujarati & Porter, 2012).

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2016), uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam suatu model. Pada model yang baik seharusnya tidak ada korelasi antara variabel-variabel independen (bebas). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui gejala multikolinearitas yaitu dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Gujarati & Porter (2012) mengatakan bahwa apabila korelasi antara dua variabel independen menunjukkan angka melebihi 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolinearitas.

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa seluruh *cell* antara variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi yang berada di bawah 0.8. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas di dalam penelitian ini, artinya antara seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak memiliki korelasi yang tinggi

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual antara yang satu dengan yang lain (Ghozali, 2016). Uji heteroskedastisitas yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Uji *Bruetch Pagan Godfrey* dimana dimana tahapannya yaitu membentuk nilai logaritma kuadrat dari residual dan melakukan regresi pada seluruh variabel bebas terhadap nilai tersebut (Widarjono, 2017). Hasil Uji Glajser dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	6.4327	9.1124	0.0000
PAD	0.0015	0.3630	0.7170
DAU	0.0036	1.8675	0.0635
DAK	-0.0027	-1.1912	0.2351

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa nilai probabilitas pada Uji *Bruetch Pagan Godfrey* untuk seluruh variabel bebas lebih besar dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa model yang dianalisis dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Uji multikolinearitas adalah salah satu uji di dalam asumsi klasik bertujuan untuk melihat adanya atau tidaknya korelasi antar variabel independen di dalam penelitian. Ghazali (2011) mengatakan bahwa model yang baik adalah model dimana antar variabel bebas tidak memiliki korelasi. Gujarati dan Porter (2012) menambahkan bahwa nilai korelasi antara nilai korelasi antara variabel bebas harus berada di bawah 0.8. Uji multikolinearitas di dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai korelasi antara variabel bebas Pada Tabel 4 Analisis Korelasi. Terlihat bahwa seluruh *cell* antara variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi yang berada di bawah 0.8. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala

multikolenearitas di dalam penelitian ini, artinya antara seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak memiliki korelasi yang tinggi.

Estimasi Regresi Data Panel

Hasil pemilihan model menunjukkan bahwa model yang tepat untuk diestimasi dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*. Adapun hasil regresi secara *Random Effect Model* (REM) dapat dilihat pada Tabel 6:

Tabel 6. Estimasi *Random Effect Model*

Variabel	Koefisien	t-statistik
C	-192.6714	-3.3653***
PAD	1.7771	6.5327***
DAU	1.6593	11.7664***
DAK	1.7213	14.2723***
R-squared		0.8986
Adjusted R-squared		0.8969
F-statistic		531.8354***
Durbin-Watson		1.9294

Sumber : Data Diolah, 2022

Keterangan : ***, **, * signifikan pada level 1%, 5% dan 10%

Berdasarkan Tabel 6, maka persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$BD = -192.6714 + 1.7771PAD + 1.6593DAU + 1.7213DAK$$

Berdasarkan Persamaan di atas, terlihat bahwa nilai konstanta dalam penelitian ini sebesar -192.6714. Ini menunjukkan bahwa ketika PAD, DAU dan DAK bernilai 0, maka belanja daerah akan mengalami defisit sebesar Rp -192.6714 miliar. Adapun koefisien PAD dalam penelitian ini bernilai positif sebesar 1.7771. Ini menunjukkan bahwa ketika PAD naik Rp 1 miliar, maka belanja daerah akan meningkat sebesar Rp 1.7771 miliar. Selain itu, nilai koefisien tersebut juga tergolong signifikan secara statistik di level 1% ($prob < 0.01$), sehingga H_1 dalam penelitian ini diterima yang artinya PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Selanjutnya, DAU memiliki nilai koefisien positif sebesar 1.6593. Ini menunjukkan bahwa ketika DAU naik Rp 1 miliar, maka belanja daerah akan meningkat sebesar Rp 1.6593 miliar. Selain itu, nilai tersebut juga tergolong signifikan secara statistik di level 1% ($prob < 0.01$), sehingga H_2 dalam penelitian ini diterima, artinya DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Selanjutnya, DAK memiliki nilai koefisien positif sebesar 1.7213. Ini menunjukkan bahwa ketika DAK naik Rp 1 miliar, maka belanja daerah akan meningkat sebesar Rp 1.7213 miliar. Selain itu, nilai tersebut juga tergolong signifikan secara statistik di level 1% ($prob < 0.01$), sehingga H_3 dalam penelitian ini diterima, artinya DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Pembahasan

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD di suatu daerah akan mendorong pada peningkatan belanja daerah. Sementara itu, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa PAD merupakan prediktor yang dapat meningkatkan belanja daerah. Beberapa studi sebelumnya juga telah membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Mawarni & Abdullah, 2013; Mangowal, 2013; Syamni & Ichsan, 2018).

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang ketika nilainya tinggi akan mengindikasikan bahwa daerah tersebut mampu mengembangkan perekonomian daerahnya, sehingga menjadi lebih mandiri secara keuangan (Mulyati & Yusriadi, 2017). Pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan daerah yang dapat mencerminkan kondisi riil daerah dan menunjukkan kemandirian keuangan daerah (Nufus & Asmara, 2017). PAD sendiri dapat diartikan sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2016). PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. PAD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu mendanai kebutuhannya dengan dana yang berasal dari daerah sendiri (bukan bantuan dari pusat), sehingga memberikan dampak pada kemandirian daerah (Andriani & Wahid, 2018).

Daerah yang memiliki PAD yang tinggi tentunya daerah yang mandiri dan mampu memanfaatkan potensinya untuk menambah kas daerah (Asih, 2018). Dalam hal tersebut, dibutuhkan belanja daerah untuk mengembangkan potensi-potensi daerah tersebut, sehingga anggaran belanja daerah tentunya meningkat, dimana belanja daerah dapat dikururkan pada aspek peningkatan infrastruktur dalam kaitannya dengan PAD (Ernayani, 2017). Lestari *et al.* (2016) berpendapat bahwa PAD yang tinggi menyebabkan daerah tersebut menjadi mandiri, sehingga kegiatan belanja daerah yang dikururkan dapat optimal. Ini sejalan dengan yang ditemukan oleh Syamni & Ichsan (2018), dimana belanja daerah akan meningkat pada saat PAD daerah tersebut tinggi.

2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, sehingga H_1 dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ketika DAU meningkat, maka belanja daerah akan meningkat. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa DAU merupakan prediktor dalam meningkatkan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil ini juga sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang telah membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Ernayani, 2017; Rasyid, 2018; Syamni & Ichsan, 2018).

Penelitian ini membuktikan bahwa DAU dapat menjadi alat yang dapat meningkatkan belanja daerah. DAU sendiri merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Awaniz, 2011). DAU memberikan dampak pada peningkatan belanja daerah (Rasyid, 2018). DAU yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki desentralisasi fiskal yang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan publik melalui pengeluaran daerah (dalam hal ini belanja daerah) (Lestari *et al.* 2016).

Pada umumnya, DAU banyak digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah. Belanja pegawai sendiri tergolong dalam langsung daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DAU banyak digunakan untuk mendorong operasional kerja daerah, dimana dengan berjalannya operasional dengan baik akan membuat daerah tersebut memiliki kinerja yang baik pula (Angelina *et al.*, 2020). Selain itu, Adanya DAU menjadi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana hal tersebut membuat pemerintah daerah leluasa dapat menggunakan DAU dalam memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dapat diwujudkan dengan optimalisasi belanja daerah (Hairiyah *et al.*, 2018). Uraian tersebut menunjukkan bahwa DAU memberikan dampak positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

3. Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAK, akan memberikan dampak pada kenaikan belanja daerah. Sementara itu, hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa DAK merupakan prediktor dalam meningkatkan belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil ini juga sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang telah membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Syamni & Ichsan, 2018; Ferdiansyah *et al.*, 2018; Salawali *et al.*, 2016).

Hasil temuan ini memberikan implikasi bahwa DAK dibutuhkan dalam meningkatkan belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. DAK sendiri merupakan bantuan besumber dari APBN yang diberikan untuk suatu daerah tertentu bertujuan untuk mendana kegiatan yang menjadi keperluan daerah dengan mengikuti kebijakan dan program pembangunan nasional berdasarkan Undang-undang 33 Tahun 2004. Adanya dana transfer dari pusat ke daerah menuntut pihak daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya, serta melakukan kegiatan investasi demi peningkatan infrastruktur daerah (Syamni & Ichsan, 2018). DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan daerah (Hairiyah, 2018). Uraian tersebut menunjukkan bahwa DAK menjadi faktor yang mempengaruhi belanja daerah.

4. Pengujian Flypaper Effect

Flypaper effect merupakan suatu kondisi, dimana daerah bergantung pada dana transfer pusat dalam realisasi belanja daerahnya (Kusumadewi & Rahman, 2007). Deteksi yang digunakan untuk melihat suatu daerah terjadi *flypaper effect* atau tidak yaitu dengan melihat dari besaran pengaruh yang diberikan oleh dana transfer dengan pendapatan asli daerah dalam merespon belanja daerah (Junaidi, 2012; Inayati, 2014; Suyanto, 2015; Haryani, 2017; Zulfan & Mustika, 2018). Secara *overall*, terlihat bahwa nilai pengaruh DAU dan DAK jauh lebih tinggi dibandingkan koefisien PAD dalam mempengaruhi belanja daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, artinya daerah-daerah di Provinsi Aceh lebih dominan menggunakan dana transfer pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya.

Flypaper effect terjadi di Aceh dikarenakan Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Aceh cenderung bergantung pada dana-dana transfer pusat, sehingga menyebabkan pihak pemerintah menjadi malas dalam menggali potensi-potensi daerah. Hal ini juga sejalan dengan yang ditemukan oleh Zulfan & Mustika (2018), dimana dana transfer pusat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PAD di Provinsi Aceh untuk periode waktu 2009-2016. Zulfan & Mustika (2018) juga menambahkan bahwa PAD malah memberikan kontribusi yang semakin melemah dikarenakan adanya dana OTSUS yang berlimpah ke Provinsi Aceh, yang menyebabkan Aceh menjadi tidak mandiri. Seharusnya Aceh mampu mengelola dana transfer pusat tersebut untuk meningkatkan PAD, yang dapat dilakukan dengan menggali potensi-potensi masing-masing daerah Kabupaten/Kota yang ada. Dengan demikian, Aceh akan mampu memiliki PAD yang tinggi dan menjadi mandiri secara keuangan daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dibahas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah akan membuat daerah menjadi lebih mandiri secara keuangan dan belanja daerah akan menjadi lebih tinggi.
2. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Ini menunjukkan bahwa DAU yang merupakan dana transfer pusat mampu mendorong operasional rumah tangga daerah, sehingga belanja daerah mampu dijalankan dengan baik.
3. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. DAK yang biasanya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur-infrastruktur publik,

seperti infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan daerah memiliki keterkaitan dengan komponen-komponen belanja daerah, sehingga ketika DAK tinggi maka belanja daerah juga akan meningkat.

4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih bergantung pada dana transfer pusat sehingga mengindikasikan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih belum mandiri secara keuangan.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sehingga disarankan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Seperti Kota Subulussalam yang menjadi daerah dengan PAD terendah berdasarkan hasil riset ini. Pihak Pemerintah Kota Subulussalam dapat melakukan optimalisasi dari parkir dan PBB. Selain itu, Pemerintah Kota Subulussalam juga bisa mengembangkan UMKM dengan menjual produk lokal dan berkolaborasi dengan BUMD dalam pemberdayaan UMKM tersebut.
2. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sehingga disarankan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk melakukan optimalisasi pada penggunaan DAU dalam belanja. Seperti pada Kota Subulussalam yang merupakan daerah dengan DAU terendah merujuk pada riset ini. Pemerintah Kota Subulussalam dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB, dimana kedua komponen tersebut adalah indikator kebutuhan fiskal dalam melaksanakan fungsi layanan dasar umum daerah sebagai dasar pemberian DAU dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan serta meningkatkan perekonomian daerah dari sektor-sektor UMKM sesuai dengan potensi daerah tersebut.
3. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sehingga disarankan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk menggunakan DAK pada infrastruktur-infrastruktur potensial yang dapat mendorong kesejahteraan rakyat. Seperti pada Kota Subulussalam yang merupakan daerah dengan DAK terendah dalam riset ini. Pemerintah Kota Subulussalam dapat meningkatkan infrastruktur potensialnya di daerah guna mendorong terciptanya efisiensi belanja daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S., & Riani, L. (2020). *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Widya Ganecwara*, 10(4).
- Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014-2018. *Bahtera Inovasi*, 4(1), 36-53.
- Asih, S. (2018). Pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten dan kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 177-191.
- Awaniz, Berlian Nur. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan. *Jurnal Keuangan Daerah*. Vol 1. No 2.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(1), 43-52.

- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *INOVASI*, 14(1), 44-52.
- Gujarati & Porter. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2018). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *KINERJA*, 14(2), 85-91.
- Halim. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hapid, H., Halim, M., & Wulandari, Y. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1).
- Haryani, H. (2017). Analisis *Flypaper Effect* Pada Pemerintah Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2).
- Inayanti & Setiawan, D. (2017). Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(2), 220-239.
- Inayati, Nur Isna (2014). Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 1 No. 2.
- Indriansyah (2017). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(10).
- Junaidi. (2012). Jakarta Asimetri pada *Flypaper Effect* (Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. Vol. 14 No. 1.
- Kusumadewi, Diah Ayu & Arief Rahman. (2007). *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *JAAI*. Vol. 11 No. 1.
- Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2017). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 1(2), 44-55
- Mahsun, M., Firma Sulistiyowati, & Heribertus Andre Purwanugraha. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Mangowal, J. C. (2013). Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Mulyati, S., & Yusriadi, Y. (2017). Dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Provinsi Aceh. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 211-220.
- Mulyati, S., & Yusriadi, Y. (2017). Dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Provinsi Aceh. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 211-220.
- Naganathan, M. dan K.J. Sivagnanam. (2013). *Federal Transfer And Tax Efforts Of States In India*. *Indian Economic Journal*, Vol. 47 No. 4.
- Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 10(1).
- Nufus, H & Asmara, J. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Dana Otonomi Khusus sebagai Pemoderasi pada Kab/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah*, 2(3), 1-9.
- Oktavia, D (2014). *Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2003-2013*. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, vol. 1. No. 2.
- Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), 811-827.
- Rasyid, M. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 2. No 1.

- Roy, S., Ara, J., Das, N., & Quisumbing, A. R. (2015). *Flypaper effects in transfers targeted to women: Evidence from BRAC's Targeting the Ultra Poor program in Bangladesh*. *Journal of Development Economics*, 117, 1-19.
- Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lopian, A. C. (2016). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2).
- Shah, A. (2014). *The reform of intergovernmental fiscal relations in developing and emerging market economies*. *Market Economics*, Vol 5, No 5.
- Simanjuntak, L., Subeki, A., Ferina, I. S., & Yusrianti, H. (2013). *Analysis of Flypapaer Effect in General Allocation Fund and Regional Original Income to Regional Expenditure of Districts and Cities in South Sumatera*. *Jurnal Akuntansi Publik*. Vol 1. No 2.
- Suyanto, S. (2015). *Flypaper Effect Theory Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 69-92.
- Syamni, G. & Ichsan (2018). *The Determinants of Districts/Cities Spending in Aceh Province: An Analysis of Electoral Districts*. *The Journal of Social Sciences Research*, 295-298.
- Tahar, A & Zakhiya, M. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 12, No. 1.
- Wandira, A. G. (2013). *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal*. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika. UPP STIM YKPN. Yogyakarta*.
- Zulfan, T., & Mustika, E. (2018). *Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Fly paper effect di Provinsi Aceh*. *Jurnal EMT KITA*, 2(1), 19-27.